

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Maka dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan program. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya

dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelayanan umum dengan titik berat pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, serta penyediaan fasilitas pelayanan dasar.

Untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan adalah belanja daerah. Keberadaan anggaran belanja daerah apabila dibandingkan dengan investasi swasta nilainya relatif kecil meskipun demikian dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan daerah.¹

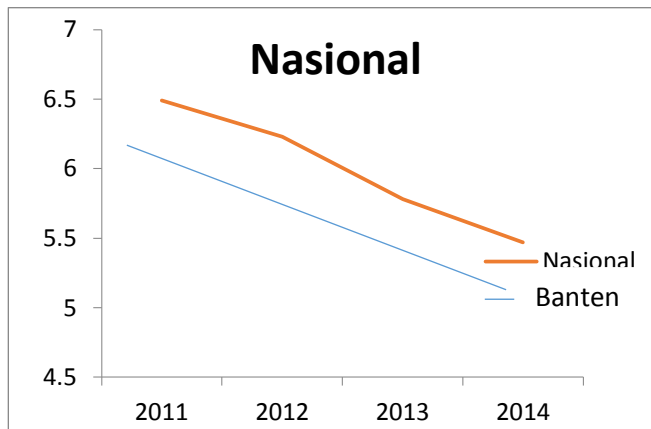
Belanja langsung memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan.² Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali sumber dana potensial yang ada di daerah. Sumber belanja langsung yang dimaksud adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi

¹M. Yusuf, *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan terbaik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 1.

²Ulfa Chaeurunisa, *peranan pendapatan daerah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2011), 2.

peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Banten dan Nasional

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dari selama empat tahun terakhir, yakni 2011-2014 terus mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6,39% tahun 2012 sebesar 6,15% tahun 2013 sebesar 5,86% tahun 2014 sebesar 5,47%. Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2011 sebesar 6,49%

tahun 2012 sebesar 6,23% tahun 2013 sebesar 5,78% tahun 2014 sebesar 5,47%.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten secara agregat selama tahun 2013 menjadi 5,86%. Meningkatnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta realisasi investasi yang lebih tinggi mendorong tingkat pertumbuhan dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dengan kecepatan yang lebih tinggi didorong oleh sektor pertanian, sektor konstruksi, dan sektor jasa-jasa. Dari sisi permintaan terlihat bahwa terjadi perlambatan di investasi. Dari sisi penawaran, perlambatan terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air.

Dari 64 program urusan wajib, berdasarkan evaluasi, terdapat 15 program yang capaian kinerjanya di bawah 80%. Sebanyak 15 program itu menyangkut persoalan kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketenagakerjaan, aset daerah, kapasitas sumber daya

manusia (SDM) aparatur dan lembaga perwakilan rakyat daerah, ketahanan pangan, pemuda dan pramuka serta program peternakan pertanian hingga program transmigrasi.

Gagalnya capaian kinerja tersebut diakui karena persoalan pengadaan lahan yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2014 target pendapatan mencapai 103,3% atau sebesar Rp. 7,068 triliun dari target Rp. 6,840 triliun. Di lain pihak, rencana belanja daerah sebesar Rp. 7,872 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp. 6,192 triliun atau sebesar 78,65% dengan jumlah silpa sebesar Rp. 1,680 triliun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Belanja Langsung dan Sisa Lebih*

*Perhitungan Anggaran/SiLPA Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten”*

B. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah diuraikan secara mendasar dalam pembahasan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. LPE Provinsi Banten selama empat tahun terakhir, yakni 2011-2014 terus mengalami penurunan.
2. Belum optimalnya Realisasi Belanja daerah (Belanja Langsung) di Provinsi Banten yang kemudian dananya masuk dalam silpa.

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan juga untuk mencapai keefektifan waktu dalam melakukan penelitian. Maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaruh belanja langsung dan sisa lebih perhitungan anggaran/SiLPA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
2. Data yang digunakan pada penelitian ini hanya pada periode 2011-2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten?
2. Bagaimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten?
3. Bagaimana Belanja Langsung dan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota
Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ada pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana ada pengaruh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui bagaimana ada pengaruh belanja langsung dan SiLPA secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan

dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah diharapkan mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian serta dapat menggunakan beberapa variabel terkit lainnya yang mungkin dapat dijadikan sebagai faktor naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih *uptodate*, baik, jelas, dan akurat.
3. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar Strata 1 (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serta, dapat menambah pengetahuan dan mengaplikasikan secara langsung dengan menghadapi kondisi secara nyata dilapangan dan mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dengan metode ilmiah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan aliran pemikiran teoritis oleh peneliti dengan cara memecahkan masalah secara teoritis. Kerangkaian pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya.

Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN.³Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu keadaan di suatu negara yang menunjukkan adanya peningkatan *produk domestik bruto* (PDB) masyarakatnya tanpa perlu membandingkan besar atau

³Tulus Tambunan, *perekonomian Indonesia*, cet 1, (Bogor: Ghali Indonesia, 2013), 40-41.

kecilnya tingkat pertumbuhan penduduk, akibat atau tanpa memperbaiki kondisi yang ada.⁴

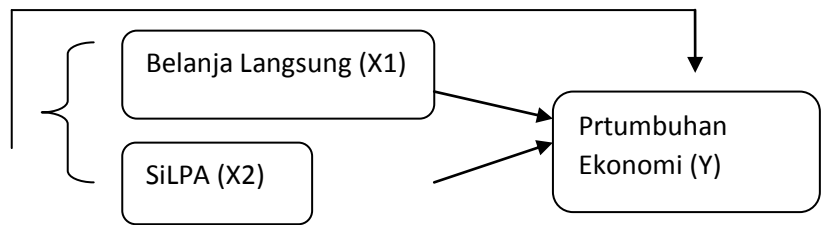
Untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan adalah belanja daerah. Keberadaan anggaran belanja daerah apabila dibandingkan dengan investasi swasta nilainya relatif kecil meskipun demikian dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.⁵ jadi,

⁴Mardiyanto dan Amir Suhadimanto, *Ekonomi*, Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 38.

belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh dalam perekonomian suatu daerah.

Variabel lain yang menarik untuk dikaji yaitu SiLPA. SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Dari uraian diatas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pengaruh Belanja Langsung dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

⁵Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2010), 15-16.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatas masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam, konsep pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, teori-teori dan model-model pertumbuhan ekonomi, peran pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, ukuran

pertumbuhan ekonomi, pengertian belanja langsung, jenis-jenis belanja langsung, pengertian sisa lebih perhitungan anggaran/SiLPA, bentuk penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran/SiLPA.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis metode penelitian, instrumen penelitian, dan teknis analisis data, dan operasional variabel.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, uji persyaratan analisis, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis.